

ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN PROYEKSI PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012 – 2016

Devi Inggarwati ¹⁾

Suharno ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾deviinggar24@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the contribution, effectiveness and projection of company earnings to the local revenue in Sragen regency in 2012 - 2016. This research is a case study conducted in Sragen Regency in 2012 - 2016. Secondary data used in this research comes from BPPKAD Sragen regency, with research object at company area in Sragen regency. Analytical techniques used are contribution analysis, effectiveness analysis and projection analysis. The result of the analysis of the contribution of local company's revenue to the local revenue in Sragen Regency in 2012 - 2016 shows the average contribution rate of 3.31%, this means that the revenue contribution of regional companies to the local revenue is stated to contribute but not maximally because the percentage less than four percent. The effectiveness analysis concludes that the revenue of regional companies in 2012 - 2016 has an average effective rate of 100.49%, it indicates that the revenue of regional companies 2012 - 2016 can be said to be very effective because the percentage is more than one hundred percent. While the analysis of regional revenue trends and local revenue of Sragen regency from 2017 until 2021 has increased.

Keywords: *contribution, effectiveness, trend, regional company, local original income*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang pesat di Indonesia pada saat ini dan didukung oleh teknologi informasi, batasan wilayah antar daerah dalam suatu negara seakan sudah hilang. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi menyebabkan lalu lintas manusia, barang, jasa dan lain sebagainya menjadi lebih mudah dalam berkegiatan dibanding masa lalu. Peningkatan perekonomian pun telah mengubah gaya hidup masyarakat secara umum dalam berbagai kehidupan dasar. Adanya perkembangan jaman disertai dengan perkembangan perekonomian ini persaingan usaha di bidang ekonomi pun semakin ketat, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan strategis untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sejak tahun 2001 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melakukan otonomi seluas-luasnya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diharapkan pemerintah mampu menggali sumber daya yang ada untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari perusahaan milik daerah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan daerah dituntut

untuk senantiasa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kapabilitas dalam bersaing. Salah satu perusahaan milik pemerintah yang tidak lepas dari persaingan usaha dengan perusahaan swasta atau asing yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah melalui penerimaan PAD. Tantangan PAD salah satunya dapat dijawab melalui meningkatkan peran atau kontribusi BUMD. Secara makro, peranan BUMD dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja (Purwadi, 2002: 3). Sebagai wujud nyata investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut tetap dengan kondisi seperti saat ini atau mengikuti persaingan dengan melakukan perubahan visi, misi, dan strategi bisnisnya.

BUMD idealnya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagai perwujudan dari peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Namun, dalam perkembangannya BUMD justru menjadi salah satu kendala dalam menciptakan kestabilan keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi sumber penerimaan, bahkan BUMD bisa saja membebani keuangan daerah. Dalam sebuah penelitian memberikan temuan yang menarik terkait dengan kinerja BUMD di beberapa kota di Jawa Tengah yang belum menunjukkan keefisienan dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia kurang dari 1% (Setiawan dkk, 2008: 2).

Salah satu daerah yang perkembangan ekonominya didukung oleh BUMD adalah Kabupaten Sragen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sragen tercatat memiliki 8 BUMD, terdiri dari 4 BUMD berbentuk Badan Pengelola (BP), 3 Perusahaan Daerah (PD) dan 1 perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan dari perkembangan perusahaan daerah di Kabupaten Sragen dalam rangka menghadapi persaingan maka pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan kapabilitas BUMD.

Berdasarkan sasarannya BUMD dibedakan menjadi dua golongan yaitu perusahaan daerah yang berguna untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. BUMD tersebut bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM), serta berbagai jasa dan usaha produktif di bidang lainnya. Beberapa perusahaan milik daerah yang ada di Kabupaten Sragen yaitu PD. BPR Karangmalang, PD. BPR Djoko Tingkir, PD. BKK Tanon, BPR Syariah, PDAM Tirta Negoro, Perusda Bengkel Terpadu, PT Sragen Trading (Gentrade), dan PD. Percetakan. Berbagai sektor perusahaan daerah di atas maksud dan tujuan didirikannya juga berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah yaitu untuk perkembangan perekonomian daerah serta menunjang pendapatan daerah.

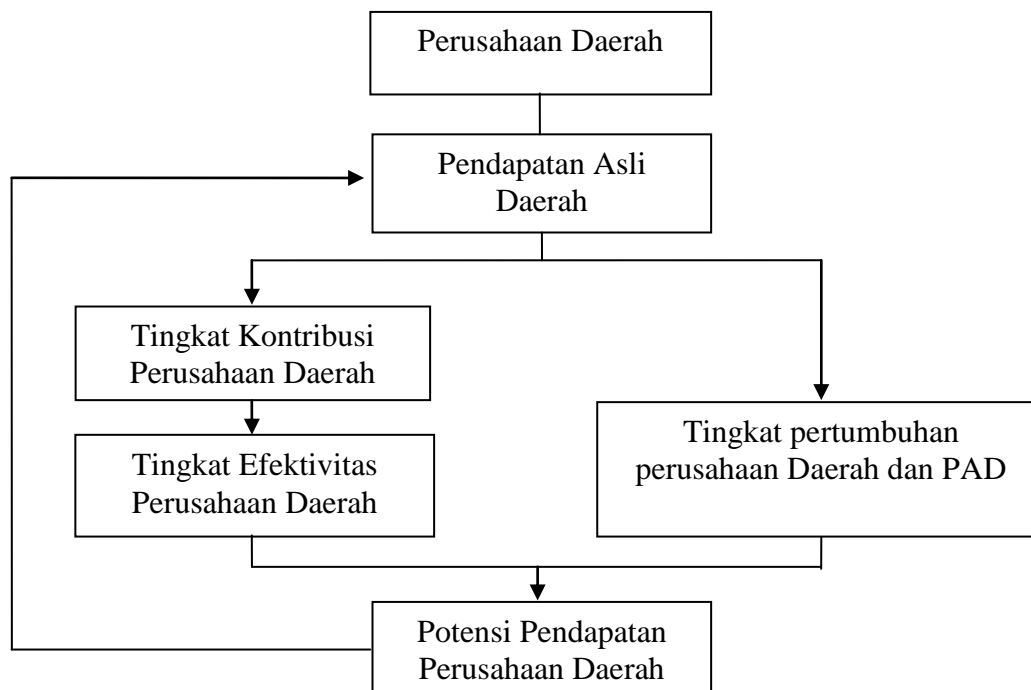
Secara umum dari seluruh perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Sragen kondisinya bisa dikatakan sama dengan apa yang terjadi pada kebanyakan BUMN. Hanya saja persoalan BUMD kurang terekspos karena posisinya secara makro kurang strategis jika dibandingkan dengan BUMN. Apabila dibuat perbandingan antara BUMN dengan BUMD maka dapat dilihat jelas kesamaan permasalahan yang ada diantara keduanya. Pertama, masalah *efisiensi*. Perusahaan daerah banyak yang beroperasi dibawah kondisi yang tidak efisien. Adanya pemborosan dana yang kurang terkontrol karena para pengelolanya tidak memiliki kemampuan yang cukup. Keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lainnya diambil dengan tidak profesional dalam melakukan pertimbangan. Serta pekatnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme menandakan pengelola BUMD yang tidak profesional.

Kedua, masalah *intervensi* dan birokrasi. Bila sekarang ini ada BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan. Salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan pemerintah serta lambannya peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini keputusan yang bersifat strategis maupun konvensional harus terlebih dahulu ijin dengan pemerintah daerah namun respon yang diberikan pemerintah dapat dikatakan lambat dalam menanggapi. Ketiga, pengendalian dan pengawasan. Selaku pemilik, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengawasi laju perkembangan dari BUMD di wilayah Sragen. Biasanya pemerintah daerah membentuk suatu badan pengawas yang bertugas seperti dewan komisaris seperti halnya yang ada di perusahaan swasta.

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan daerah tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat berbagai masalah yang timbul baik dari dalam maupun luar perusahaan itu sendiri, seperti halnya persoalan yang terjadi pada saat ini di BPR Djoko Tingkir Sragen yang 100% sahamnya milik pemerintah kabupaten. Persoalan tersebut berupa kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) di mana BPR Djoko Tingkir melebihi angka di atas rata-rata nasional NPL di Jawa Tengah yaitu sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan BPR Karangmalang yang mampu menekan NPL-nya sampai 4% BPR Djoko Tingkir jauh berada di atasnya, hal itu disebabkan tingkat kepatuhan nasabah kredit yang rendah serta seleksi nasabah kredit yang kurang pas (Solopos, 2017). Hal tersebut tentunya saja dapat mengganggu jalannya perputaran dana yang ada pada BPR Djoko Tingkir dan dapat mengurangi pendapatan daerah di Kabupaten Sragen. Lebih lanjut penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan kontribusi, sedangkan yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah laba yang disetorkan dari hasil perusahaan milik daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen.

Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian ini memberikan penjelasan bahwa sumbangan pendapatan perusahaan daerah kemudian disalurkan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kontribusi, tingkat efektivitas dan analisis proyeksi realisasi penerimaan pendapatan perusahaan daerah.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Sragen dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
2. Perusahaan Daerah adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan publik.
3. Kontribusi pendapatan Perusahaan Daerah adalah suatu pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas pendapatan Perusahaan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Efektivitas pendapatan Perusahaan Daerah adalah suatu gambaran tentang kemampuan perusahaan BPPKAD dalam merealisasikan pendapatan Perusahaan Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
5. Analisis proyeksi adalah perhitungan yang menggambarkan besarnya perkiraan penerimaan Pendapatan Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen tahun 2012 - 2016, obyek penelitian ini merupakan Perusahaan Daerah di Kabupaten Sragen yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Sragen.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari pendapatan perusahaan daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Perusahaan Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 163)

Menurut Fuad Bawahir (1999: 103) klasifikasi kriteria kontribusi dapat diasumsikan sebagai berikut:

- 1) Persentasi 0%-0,9% Tidak Berkontribusi
- 2) Persentasi 1%-1,9% Kurang Berkontribusi
- 3) Persentasi 2%-2,9% Cukup Berkontribusi
- 4) Persentasi 3%-3,9% Berkontribusi
- 5) Persentasi > 4% Sangat Berkontribusi

Kontribusi pendapatan perusahaan daerah Kabupaten Sragen tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perhitungan Kontribusi Pendapatan Perusahaan Daerah Tahun 2012 – 2016

Tahun	Realisasi Pendapatan PD (Rupiah)	Ralisasi PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	5.613.703.411	98.974.699.153	5,67	Sangat berkontribusi
2013	4.447.021.636	150.200.993.847	2,98	Cukup berkontribusi
2014	5.017.275.651	254.392.449.817	1,97	Kurang berkontribusi
2015	8.013.084.210	267.711.820.479	2,99	Cukup berkontribusi
2016	8.743.552.989	297.176.332.577	2,94	Cukup berkontribusi
	Rata-rata		3,31	Berkontribusi

Sumber: Data sekunder diolah

Rata-rata kontribusi pendapatan perusahaan daerah Kabupaten Sragen selama lima tahun yaitu tahun 2012 - 2016 sebesar 3,31%, berdasarkan kriteria kontribusi maka rata-rata kontribusi pendapatan perusahaan daerah tahun 2012 - 2016 tergolong berkontribusi.

2. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pendapatan perusahaan daerah Kabupaten Sragen dalam merealisasikan penerimaan pendapatan perusahaan daerah. Adapun rumus perhitungan efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Perusahaan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Perusahaan Daerah}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2011, 170)

Menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 klasifikasi kriteria efektivitas dapat diasumsikan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 70% - 80% berarti kurang efektif.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Hasil perhitungan efektivitas pendapatan perusahaan daerah di Kabupaten Sragen tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Pendapatan Perusahaan Daerah Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target PD (Rupiah)	Realisasi PD (Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria
2012	6.279.633.000	5.613.703.411	89,39	Cukup Efektif
2013	4.447.348.000	4.451.199.786	100,08	Sangat Efektif
2014	4.463.658.000	5.017.275.651	112,4	Sangat Efektif
2015	8.012.022.000	8.013.084.210	100,01	Sangat Efektif
2016	8.683.549.000	8.743.552.989	100,58	Sangat Efektif
	Rata-rata		100,49	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah

Rata-rata efektivitas pendapatan perusahaan daerah Kabupaten Sragen selama lima tahun yaitu tahun 2012 - 2016 dinyatakan sangat efektif karena persentase efektivitasnya menunjukkan lebih dari seratus persen yaitu 100,49%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun dalam memperoleh pendapatan masih mengalami naik turun.

3. Analisis Proyeksi

Analisis proyeksi merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk meramalkan masa yang akan datang dengan cara mengkaji data yang ada. Penelitian analisis *trend* ini yang digunakan untuk mengetahui proyeksi pendapatan perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah selama 5 tahun ke depan yaitu tahun 2017 – 2021, menurut Subagyo (2003: 101) sebagai berikut:

Rumus penghitungannya:

$$Y' = a + bX, \text{ di mana}$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \quad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

Keterangan:

Y' = Proyeksi penerimaan kontribusi perusahaan daerah, pendapatan asli daerah

X = Unit waktu / periode yang dapat dinyatakan dalam tahun

a = Nilai trend pada periode dasar

b = Koefisien korelasi

n = Banyaknya data

Perhitungan *trend* pendapatan perusahaan daerah dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 3. Perhitungan *Trend* Pendapatan Perusahaan Daerah Tahun 2012 – 2016

No.	Tahun	(Y)	X	XY	X ²
1.	2012	5.613.703.411	-3	-16.841.110.233	9
2.	2013	4.451.199.786	-1	-4.451.199.786	1
3.	2014	5.017.275.651	0	0	0
4.	2015	8.013.084.210	1	8.013.084.210	1
5.	2016	8.743.552.989	3	26.230.658.967	9
Jumlah		31.838.816.047	0	12951433158	20

Sumber: Data sekunder diolah

X adalah skala dari tahun, tahun diukur dengan berturut-turut mulai dari tahun awal sebesar satu, tahun kedua sebesar 2 tahun ketiga sebesar 3 dan seterusnya.

Dari tabel di atas kemudian dicari nilai dari persamaan *trend*-nya yaitu

$$Y = a + bX$$

Tabel 4. Perhitungan a dan b

$$a = \frac{\sum y}{n} = \frac{31.838.816.047}{5} = 6.367.763.209$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{12.951.433.158}{20} = 647.571.657,9$$

Sumber: Data sekunder diolah

Setelah nilai a dan b diketahui, maka persamaan *trend*-nya:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 6.367.763.209 + 647.571.657,9 (X)$$

Dari persamaan *trend* di atas dapat dibuat suatu estimasi pendapatan perusahaan daerah untuk 5 tahun ke depan dengan anggapan bahwa faktor penyebab perubahan dalam suatu *trend* memiliki pengaruh yang sama dan bersifat *continue*. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y_{2017} &= 6.367.763.209 + 647.571.657,9 (5) \\ &= 6.367.763.209 + 3.237.858.290 \\ &= 9.605.621.499 \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 diperkirakan realisasi target pendapatan perusahaan daerah bisa mencapai Rp 9.605.621.499

$$\begin{aligned} Y_{2018} &= 6.367.763.209 + 647.571.657,9 (7) \\ &= 6.367.763.209 + 4.533.001.605 \\ &= 10.900.764.815 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 diperkirakan realisasi target pendapatan perusahaan daerah bisa mencapai Rp 10.900.764.815

$$\begin{aligned} Y_{2019} &= 6.367.763.209 + 647.571.657,9 (9) \\ &= 6.367.763.209 + 5.828.144.921 \\ &= 12.195.908.130 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 diperkirakan realisasi target pendapatan perusahaan daerah bisa mencapai Rp 12.195.908.130

$$\begin{aligned} Y_{2020} &= 6.367.763.209 + 647.571.657,9 (11) \\ &= 6.367.763.209 + 7.123.288.237 \\ &= 13.491.051.446 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 diperkirakan realisasi target pendapatan perusahaan daerah bisa mencapai Rp 13.491.051.446

$$\begin{aligned} Y_{2021} &= 6.367.763.209 + 647.571.657,9 (13) \\ &= 6.367.763.209 + 8.418.431.553 \\ &= 14.786.194.762 \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 diperkirakan realisasi target pendapatan perusahaan daerah bisa mencapai Rp 14.786.194.762

Berdasarkan hasil analisis proyeksi di atas dapat dilihat bahwa estimasi realisasi pendapatan perusahaan daerah pada kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen untuk 5 tahun yang akan datang menunjukkan prospek yang baik

**Tabel 5. Perhitungan Trend Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 – 2016
(dalam Milyar)**

No.	Tahun	PAD (Y)	X	XY	X ²
1.	2012	98,9	-3	-296,7	9
2.	2013	150,2	-1	-150,2	1
3.	2014	254,3	0	0	0
4.	2015	267,7	1	267,7	1
5.	2016	297,1	3	891,3	9
Jumlah		1.068,2	0	712,1	20

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel 6. Perhitungan a dan b (dalam Milyar)

$a = \frac{\sum y}{n}$ $= \frac{1.068,2}{5}$ $= 213,64$	$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$ $= \frac{712,1}{20}$ $= 35,605$
---	--

Sumber: Data sekunder diolah

Setelah nilai a dan b diketahui, maka persamaan *trend*-nya:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 213,64 + 35,605 (X)$$

Dari persamaan *trend* di atas dapat dibuat suatu estimasi pendapatan asli daerah untuk 5 tahun ke depan dengan anggapan bahwa faktor penyebab perubahan dalam suatu *trend* memiliki pengaruh yang sama dan bersifat *continue*. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y_{2017} &= 213,64 + 35,605 (5) \\ &= 213,64 + 178,025 \\ &= 391,665 \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 diperkirakan realisasi target pendapatan asli daerah bisa mencapai Rp 391,665

$$\begin{aligned} Y_{2018} &= 213,64 + 35,605 (7) \\ &= 213,64 + 249,235 \\ &= 462,875 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 diperkirakan realisasi target pendapatan asli daerah bisa mencapai Rp 462,875

$$\begin{aligned} Y_{2019} &= 213,64 + 35,605 (9) \\ &= 213,64 + 320,445 \\ &= 534,085 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 diperkirakan realisasi target pendapatan asli daerah bisa mencapai Rp 534,085

$$\begin{aligned} Y_{2020} &= 213,64 + 35,605 (11) \\ &= 213,64 + 391,655 \\ &= 605,295 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 diperkirakan realisasi target pendapatan asli daerah bisa mencapai Rp 605,295

$$\begin{aligned} Y_{2021} &= 213,64 + 35,605 (13) \\ &= 213,64 + 462,865 \\ &= 676,505 \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 diperkirakan realisasi target pendapatan asli daerah bisa mencapai Rp 676,505.

Berdasarkan hasil analisis estimasi di atas dapat dilihat bahwa estimasi realisasi pendapatan asli daerah pada kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen untuk 5 tahun yang akan datang menunjukkan prospek yang baik.

PEMBAHASAN

1. Analisis Kontribusi

Kontribusi perusahaan daerah dari tahun 2012 - 2016, memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2012 dengan persentase 5,67% dan kontribusi terkecil pada tahun 2014 dengan persentase 1,97%. Hasil analisis kontribusi perusahaan daerah menunjukkan perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Sragen seperti

PD. BPR Karangmalang, PD. BPR Djoko Tingkir, BPR Syariah, Perusda Bengkel Terpadu sudah menunjukkan keaktifannya dalam menyetorkan laba perusahaan tersebut kepada PAD yang menandakan bahwa perusahaan tersebut masih produktif dalam pengelolaan kinerjanya meskipun belum secara maksimal. Sedangkan PD. BKK Tanon, PDAM Tirta Negoro, PT Sragen Trading (Gentrade), PD. Percetakan masih sangat kurang berkontribusi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut memerlukan penanganan khusus dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerjanya agar dapat memaksimalkan pendapatannya serta mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain.

2. Analisis Efektivitas

Tingkat efektivitas pendapatan perusahaan daerah pada tahun 2012 - 2016 secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efektif hanya saja pada tahun 2012 masih berada pada kondisi cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perusahaan daerah Kabupaten Sragen telah dilaksanakan secara memadai, dan menunjukkan keadaan perekonomian dan pembangunan yang mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan kembali keefektifitasannya.

3. Analisis Proyeksi

a. Analisis Proyeksi Pendapatan Perusahaan Daerah

Dilihat dari hasil analisis proyeksi pendapatan perusahaan daerah pada kantor BPPKAD Kabupaten Sragen untuk lima tahun kedepan menunjukkan prospek yang baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diharapkan pendapatan perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi serta perannya dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Proyeksi realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 9.605.621.499, tahun 2018 sebesar Rp 10.900.764.815, tahun 2019 sebesar Rp 12.195.908.130, tahun 2020 sebesar Rp 13.491.051.446 dan tahun 2021 sebesar Rp 14.786.194.762. Hasil analisis proyeksi pendapatan perusahaan daerah tersebut dapat digunakan pemerintah sebagai bahan acuan dalam merealisasikan target pendapatan perusahaan daerah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah daerah dapat meningkatkan hasil kinerjanya.

b. Analisis Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari analisis proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen lima tahun ke depan menunjukkan prospek penerimaan yang baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah. Proyeksi realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 462,875, tahun 2018 sebesar Rp 462,875, tahun 2019 sebesar Rp 534,085, tahun 2020 sebesar Rp 605,295 dan tahun 2021 sebesar Rp 676,505 (dalam milyar). Hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Sragen, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat memaksimalkan kinerjanya.

KESIMPULAN

Kontribusi pendapatan perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen dari tahun 2012 - 2016 memiliki kontribusi yang fluktuatif. Rata-rata kontribusi pendapatan perusahaan daerah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2016 sebesar 3,31%, berdasarkan kriteria kontribusi maka rata-rata kontribusi pendapatan perusahaan daerah tahun 2012 - 2016 tergolong berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen.

Efektivitas pendapatan perusahaan daerah di Kabupaten Sragen selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 - 2016 dinyatakan sangat efektif karena persentasenya lebih dari seratus persen yaitu 100,49%. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

sudah melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun masih mengalami naik turun dalam memperoleh pendapatan.

Proyeksi pendapatan perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen tahun 2017-2021 berdasarkan analisis *trend* linear menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya.

Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik dengan meningkatkan bahan-bahan penelitian dan menambah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan daerah sehingga informasi yang diberikan lebih lengkap serta memperluas ruang lingkup penelitian tidak hanya di Kabupaten Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawasir, Fuad. 1999. *Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah*. Gramedia. Jakarta.
- Depdagri. 1997. *Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Purwadi, IR. 2002. "Penelitian tentang Stategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Setiawan, dkk. 2008. "Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan: Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta: *Laporan Penelitian*". Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Surakarta. Hlm.2.
- Subagyo, Pangestu. 2003. *Statistik Deskriptif Edisi 4*. BPFE. Yogyakarta.
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Koran *SoloPos* pada 15 September 2017